


|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
|  | <b>News Title</b> : Siapkan Bursa CPO sebagai Acuan Harga Ekspor                     |                                 |
|   | <b>Media Name</b> : Jawa Pos   | <b>Journalist</b> : agf         |
|   | <b>Publish Date</b> : 23 May 2023  | <b>Tonality</b> : Positive      |
|   | <b>News Page</b> : 3   | <b>News Value</b> : 166,500,000 |
|   | <b>Resources</b> : Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti), Eddy Martono (Sekjen Gapki) | <b>Ads Value</b> : 55,500,000   |
|   | <b>Section/Rubrication</b> : Ekonomi Bisnis  | <b>Topic</b> : Bursa CPO        |

## Siapkan Bursa CPO sebagai Acuan Harga Ekspor

JAKARTA—Pengembangan perdagangan berjangka komoditas (PBK) dilakukan Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Salah satunya, kebijakan ekspor *crude palm oil* (CPO) melalui bursa berjangka di Indonesia.

Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko menjelaskan,

kebijakan tersebut merupakan strategi untuk meningkatkan kinerja ekspor dan pendapatan negara. "Yang diatur adalah ekspor untuk CPO HS 15111000 yang akan dilaksanakan melalui bursa berjangka di Indonesia yang ditunjuk Bappebti. Selain permendag, kami merancang peraturan Bappebti serta peraturan dan tata tertib

(PTT) bursa berjangka," paparnya kemarin (22/5).

Implementasi kebijakan tersebut, akan terbentuk harga acuan CPO di bursa yang transparan, akuntabel, dan *real time*. Harga acuan itu pun dapat digunakan dalam penentuan harga patokan ekspor (HPE) oleh Kemendag dan bea keluar (BK) oleh Kementerian Keuangan. Di

sisi hulu, harga tersebut dapat memperbaiki harga tandan buah segar bagi petani. "Kementerian Perdagangan menargetkan, pada Juni 2023, sudah diluncurkan kebijakan tersebut," tuturnya.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyambut baik rencana penetapan harga acuan di Bappebti. "Positifnya, bursa

komoditas kita akan berjalan lebih baik karena adanya transaksi perdagangan minyak sawit yang lebih besar dibandingkan saat ini," ujar Sekjen Gapki Eddy Martono.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mendorong Bappebti membentuk referensi harga komoditas, salah satunya CPO. **(agf/c14/dio)**